

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kawasan Timur Tengah tidak pernah surut dengan berbagai gejolak politik negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan tersebut seperti Irak, Iran, Palestina, Israel, Kuwait, Afganistan dan negara-negara lainnya hampir setiap hari media internasional memberitakan konflik ataupun gejolak yang hampir setiap saat terjadi di kawasan tersebut. Konflik dan gejolak politik kawasan Timur Tengah tidak pernah selesai karena adanya berbagai benturan ideologi ataupun kepentingan negara-negara di kawasan tersebut. Bahkan negara-negara yang letak geografisnya jauh berada dari kawasan Timur Tengah seperti Amerika Serikat juga terlibat dengan segala kepentingannya.

Sudah sejak lama Amerika Serikat sering terlibat masalah-masalah yang terjadi di kawasan Timur Tengah seperti peranan mereka dalam perang Irak ataupun posisi mereka dalam konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat mempunyai banyak kepentingan di kawasan yang penuh konflik tersebut. Ketika Amerika Serikat dipimpin oleh George W Bush, negara adikuasa tersebut sering mengeluarkan kebijakan luar negeri yang cenderung agresif, yaitu menggunakan kekuatan militer mereka untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan yang

demikianlah yang digunakan Amerika Serikat ketika mereka menyerang Irak dengan alasan untuk melucuti senjata pemusnah masal yang dimiliki oleh Irak.

Saat Barack Obama terpilih menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan George W Bush, Barack Obama mempunyai cara pandang yang berbeda dengan George W Bush begitu pula dengan kebijakan Barack Obama di Timur Tengah termasuk Irak. Barack Obama membuat kebijakan yaitu akan melakukan percepatan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak paling lambat pada Agustus 2010.¹ Padahal sebelumnya pada saat George W Bush berkuasa pemerintahannya telah membuat kebijakan bahwa pendudukan Irak akan berlangsung, jangka pendek sampai 2011 (*military operation*) dan jangka panjang sampai 2017 (*service operation*).²

Dari paparan diatas, maka dalam kesempatan kali ini penulis mencoba mengupas tentang kebijakan yang dilakukan Barack Obama di Irak yaitu mengenai kebijakan militer AS di Irak dan tertarik untuk mengajukan judul ***”Motivasi Barack Obama dalam upaya percepatan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak”*** sebagai judul skripsi.

¹“ Amerika Tarik Pasukan Tempur dari Irak pada Agustus 2010” dalam <http://www.tempo.co/read/news/2009/02/25/115161898/Amerika-Tarik-Pasukan-Tempur-dari-Irak-pada-Agustus-2010>, 23 Juni 2010

²“Biaya Ekonomi, Sosial, Politik Perang Irak” oleh Amich Allumi dalam http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel_cetak.php?aid=26996 diakses 11 September 2009

B. Tujuan Penelitian

1. Memperluas, mengkaji, dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi dan teori-teori hubungan internasional terutama yang berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan Barack Obama terhadap Irak terutama yang berkaitan dengan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak.
2. Menerapkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional pada kasus-kasus aktual sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang dipelajari selama masa perkuliahan.
3. Memenuhi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Terpilihnya Barack Husein Obama menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-44 dalam pemilu 4 November 2008 sangat menggemparkan dunia. Inilah pertama seorang kulit hitam menjadi presiden Amerika Serikat dalam lebih dari dua abad sejarah negara adidaya itu. Rakyat Amerika Serikat telah muak dengan kepemimpinan Presiden George Walker Bush yang menebarkan kecemasan di pentas internasional. Bush yang menyerang dan menduduki Irak dengan alasan yang dicari-cari bahwa rezim Saddam Husein menyimpan senjata pemusnah massal.

Obama menawarkan gagasan-gagasan baru di berbagai bidang kehidupan bagi rakyat Amerika Serikat dan komunitas internasional untuk mengembalikan

kamakmuran, kejayaan, dan otoritas moral Amerika Serikat yang telah dirusak oleh pemerintahan Bush. Obama menganggap struktur ekonomi, sosial, politik, dan militer Amerika Serikat di era Bush tidak lagi sesuai dengan situasi dunia abad ke-21. Perubahan-perubahan signifikan di berbagai bidang itu harus diubah untuk mempertahankan kepemimpinan dunia Amerika Serikat yang konsisten dengan apa yang disebut nilai-nilai Amerika Serikat seperti demokrasi, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Mengenai Irak, sejak awal Obama menolak perang Irak, pada tahun 2002, Obama menentang perang Irak karena Obama percaya bahwa sekalipun Saddam Husein adalah rezim yang menakutkan, ia tidak memiliki ancaman segera terhadap Amerika Serikat.³ Obama memperingatkan bahwa invasi Irak akan menyalakan ekstrimisme di Timur Tengah dan mengalihkan Amerika Serikat dari perang terhadap mereka yang bertanggung jawab bagi serangan teror 11 September 2001. Kebijakan politik luar negeri Obama berbeda sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan pendahulunya yaitu George Walker Bush yang menginginkan pendudukan atas Irak diperpanjang minimal sampai 2011 dan juga perang terhadap teroris yang digaungkan Bush paska tragedi WTC 11 September 2001.

Tragedi 11 September 2001 yang ditandai dengan runtuhnya menara kembar *World Trade Center (WTC)* yang menjadi simbol kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Peristiwa yang kemudian diklaim oleh pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh George W Bush sebagai terorisme tersebut

³ Tim Hikmah, *Obama Tentang Israel, Islam, Dan Amerika*, Jakarta, Mizan, 2008, hal.147.

meluluhlantahkan aset-aset ekonomi Amerika Serikat dalam sekejap, bahkan sempat juga menghancurkan Pentagon, markas besar pertahanan militer Amerika Serikat. Kejadian ini dinilai sebagai tamparan keras bagi sistem pertahanan nasional Amerika Serikat, yang mana kemudian dijadikan landasan utama pembuatan kebijakan pemerintahan George W Bush untuk memerangi terorisme dalam rangka melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat.

Dalam sekejap isu perang melawan terorisme yang diusung pemerintahan George W Bush ke seluruh penjuru dunia dan mengubah arah politik dunia. Selain menuduh Osama Bin Laden dengan Al Qaida di Pakistan sebagai teroris pelaku peristiwa 11 September yang harus diperangi, Amerika Serikat memberikan argumentasi bahwa pelaku teror didukung oleh suatu negara, dan Amerika Serikat mengarahkan tudingannya terhadap Irak dimana AS menganggap Saddam Hussein memiliki kaitan dengan jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Selain itu George W Bush menyebut Irak mempunyai persenjataan pemusnah massal seperti persenjataan kimia dan biologi yang jika jatuh ketangan teroris bisa membahayakan nasib Amerika Serikat dan takut kalau kejadian 11 September 2001 terjadi lagi.

Kekhawatiran Bush berdasar atas laporan Badan Intelijen Amerika (CIA), seperti yang dilaporkan Menlu AS saat itu Collin Powel kepada Dewan Keamanan PBB pada 5 Februari 2003. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Irak tengah mengembangkan laboratorium bergerak untuk membuat senjata kimia, selain itu Irak memiliki rudal-rudal dan laporan itu juga menyebutkan bahwa Saddam Hussein memberikan wewenang kepada militernya untuk menggunakan

gas beracun jika AS menyerang.⁴ Setelah diberi tenggang waktu agar Irak melucuti persenjataannya sendiri namun tidak disambut baik oleh Irak, akhirnya pada 20 Maret 2003 AS menginvasi Irak.

Demokrasi juga dijadikan alasan untuk menyerang Irak. Sebab Bush menganggap Irak adalah negara yang tidak demokratis, terutama dengan kepemimpinan Saddam Hussein yang dinilai sebagai pemimpin yang otoriter. Saddam adalah penguasa yang tidak memberi peluang pada oposisi atau lawan politiknya, bahkan sering menggunakan kekuasaan atau teror dalam mempertahankan kekuasaannya.⁵ Pemerintahan yang diktator dan banyak melakukan pelanggaran HAM, menjadi salah satu alasan bagi AS bahwa Irak harus dia beri pelajaran dengan dalih membebaskan dan menegakan demokrasi bagi Irak.

Selain itu, tentu saja minyak menjadi alasan utama AS menginvasi Irak. Menurut OPEC, kebutuhan minyak dunia saat ini adalah 20 sampai 23 juta barel perhari. Dari jumlah itu, 26 persennya disedot habis oleh penduduk Amerika. Sisanya, yang hanya 74 persen dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia. Pemakaian dengan jumlah yang sangat luar biasa itulah yang membuat Amerika Serikat sangat bergantung terhadap ekspor minyak dan bahan bakar luar negeri. Ini dikarenakan Irak sendiri adalah negara yang memiliki cadangan minyak terjamin terbesar kedua setelah Arab Saudi. Dalam laporan Kebijakan Energi Nasional yang dikeluarkan Gedung Putih yang dikenal sebagai "The Cheney

⁴ Harian Umum *KOMPAS*, 10 Februari 2003

⁵ Riza Sihbudi, *Irak-AS: Pertarungan Dua Setan?*, *KOMPAS*, 13 Februari 2003

Report”, disebutkan bahwa konsumsi minyak AS setengahnya lebih merupakan impor dan sebagian besar didatangkan dari kawasan Teluk, khususnya Arab Saudi. Meningkatnya ketergantungan AS pada impor minyak menjadi permasalahan penting. Ketergantungan ini akan meningkat, bahkan diperkirakan akan mencapai 90 persen pada 2020.⁶ Karena itu, bukanlah sebuah kebetulan jika Amerika menyerang Irak, karena cadangan minyak bumi di Irak. Logikanya, dengan AS menguasai dan mengendalikan Irak, dengan begitu AS dapat mengendalikan sumber minyak terbesar kedua itu sebagai alat politik yang sangat vital untuk mempengaruhi politik dunia.

Di Amerika Serikat pendapat umum dalam bentuk hasil *polling* atas popularitas Presiden merupakan salah satu senjata andalan yang dapat dimanfaatkan Presiden untuk menekan Kongres, birokrasi maupun kelompok kepentingan. Konstitusi AS menyebutkan bahwa yang paling berwenang menyatakan perang (*declarations of war*) adalah Kongres.

Dengan demikian Kongres memang secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik dan keamanan nasional.⁷ Begitu juga dengan kebijakan Presiden Bush untuk menginvasi Irak yang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kongres AS. Setiap anggota Kongres rajin mengikuti perkembangan masyarakat (*public hearing*) terhadap Presiden yang disajikan dalam bentuk hasil *polling*. Berdasarkan hasil polling inilah Kongres menentukan langkah apakah akan mendukung atau menolak setiap kemauan Presiden.

⁶ “Politik Terselubung Dibalik Isu Penarikan Pasukan AS” oleh Annida Kamilatun' Nisaa, dalam <http://groups.yahoo.com/group/insistnet/message/6404>, diakses 11 November 2009

⁷ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal 212.

Presiden, sebaliknya akan mengeksploitasi hasil polling sesuai dengan kemauannya. Bila hasil polling bagus maka Presiden akan memanfaatkannya secara kreatif untuk menekan Kongres dan mencapai tujuan-tujuannya.⁸

Dengan adanya opini publik tentang bahaya teror yang mengancam keamanan Amerika Serikat maka rakyat Amerika yang dibayangi ketakutan terus menerus memberikan dukungan yang melimpah kepada kebijakan Bush. Dukungan luas publik Amerika melalui polling berbagai media arus ini kemudian digunakan untuk menekan Kongres dan Senat AS. Tekanan itu membuat Kongres dan Senat mengabdikan berbagai kemauan Bush dalam rangka memerangi terorisme dan rencana serangan ke Irak.⁹

Pada awal invasi yang dilakukan Bush ke Irak, saat itu Bush mendapat dukungan dari masyarakat AS yang masih trauma akan peristiwa 11 september 2001. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh *CNN/USA Today/Gallup*, pada tanggal 11 September 2001, sembilan dari sepuluh orang warga AS yakin, serangan itu merupakan tindakan perang.¹⁰ Selain itu, sebagian responden juga cukup yakin atas kemampuan pemerintah Bush dalam menangani krisis saat itu.

Sementara itu di dunia internasional, rencana AS yang akan menginvasi Irak mendapat dukungan dan juga tantangan dari sekutu-sekutunya. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Prancis, Russia, China dan juga sekutu dekat AS yaitu Jerman dan Prancis menentang rencana AS yang ingin

⁸*Ibid*, hal 158

⁹ "The Impact of the Attacks on America" dalam <http://www.gallup.com/poll/4894/impact-attacks-america.aspx>, diakses 19 Desember 2009

¹⁰*USA Today*, 12 September 2001

melucuti senjata Irak karena dianggap tindakan yang berlebihan karena setelah dilakukan investigasi oleh PBB senjata-senjata pemusnah massal yang disebutkan oleh AS itu tidak pernah ada sehingga sampai dilakukannya invasi ke Irak tidak disertai oleh resolusi ataupun mandat dari PBB karena sebagian anggota Dewan Keamanan PBB menolak keinginan AS, bahkan hanya Inggris dan Spanyol yang mendukung rencana AS tersebut. Belakangan, negara-negara seperti Bulgaria, Denmark, Belanda, Estonia, Hongaria, Italia, Latvia, Polandia, El Salvador, Slovakia, Australia, Thailand, Philipina, Ukraina, Honduras, Nikaragua, mendukung invasi AS ke Irak dengan menempatkan pasukannya di Irak untuk membantu militer Amerika Serikat.

Pada 2007 dalam sebuah polling yang dilakukan CNN menunjukkan bahwa dukungan rakyat AS terhadap perang pemerintahnya di Irak sudah menurun. Polling yang dilakukan dalam rangka empat tahun agresi AS ke Irak itu dilakukan mulai tanggal 9-11 Maret 2007 oleh Opinion Research Corp sebagai pelaksana, melibatkan 1.027 responden dewasa. Hasilnya, 65 persen responden tidak percaya lagi dengan retorika AS tentang perangnya di Irak. Tingkat kepercayaan ini menurun drastis dibandingkan pada awal agresi AS ke Irak pada 2003, di mana hampir 83 persen warga AS yakin AS akan menang di Irak. Hasil polling juga menunjukkan hanya 30 persen responden yang mengaku bangga dengan perang AS di Irak. Prosentasenya menurun tajam dibandingkan tahun 2003 lalu, di mana 65 persen menyatakan bangga dengan keputusan AS menginvasi Irak. Selanjutnya dari hasil polling itu terlihat bahwa 33 persen warga AS merasa takut dan 55 persen mengaku khawatir akan perang AS di Irak. Hasil polling itu

dirilis 18 Maret 2007 setelah sehari sebelumnya ribuan warga AS berbondong-bondong menuju ke gedung Pentagon, berunjuk rasa menentang perang AS di Irak. Ketika perang Irak baru dimulai, 68 persen rakyat AS menunjukkan sikap bahwa keputusan AS untuk menginvasi Irak adalah keputusan yang benar demi kepentingan negara AS. Saat itu, menurut polling CNN, 61 persen responden menyatakan perang di Irak tidak membawa manfaat apapun bagi AS.¹¹

Kepentingan ekonomi dan kondisi militer suatu negara sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan luar negeri. Dapat dipastikan, perang Irak adalah "proyek rugi" Presiden Bush akibat kesalahan fatal dalam membuat kalkulasi biaya ekonomi-sosial-politik. Joseph Stiglitz dan Linda Bilmes dalam buku yang baru saja diterbitkan, *The Three Trillion Dollar War: the True Cost of the Iraq Conflict* (Maret 2008), mengupas secara mendalam dan lengkap mengenai biaya ekonomi-sosial-politik yang harus ditanggung pemerintah dan rakyat Amerika. Para jenderal dan arsitek perang bukan saja keliru dalam memprediksi lama perang, melainkan juga salah besar dalam membuat perhitungan biayanya. Merujuk pengalaman Perang Teluk I, yang hanya berlangsung kurang dari dua bulan dan menelan biaya "hanya" US\$ 61 miliar, para petinggi militer memprediksi Perang Teluk II dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan atau paling lama enam bulan dengan biaya antara US\$ 57-US\$ 69 miliar (setelah penyesuaian inflasi).¹²

¹¹ "Polling: Kepercayaan Rakyat AS terhadap Perang di Irak Merosot Tajam", <http://www.erasmuslim.com/berita/dunia/polling-kepercayaan-rakyat-as-terhadap-perang-di-irak-merosot-tajam.htm>, diakses 7 Januari 2010

¹² Joseph E. Stiglitz dan Linda J. Bilmes, *Perang Tiga Trilyun Dollar: Bencana Ekonomi Di Balik Invasi Amerika Ke Irak*, hal.37

George Bush, para petinggi militer, dan arsitek perang, harus menelan pil pahit lantaran perang telah memasuki *tahun* keenam pada 2008, bukan *bulan* keenam, seperti yang diprediksi, dan memakan biaya yang menakjubkan, yakni US\$ 845 miliar, berkali-kali lipat dari perhitungan semula. Namun, penting dicatat, biaya sebesar itu barulah untuk operasi militer langsung, belum termasuk rekonstruksi, dan hanya sebagian mencakup biaya tak langsung bagi para tentara purnatugas yang berhak memperoleh klaim *veteran benefits*. Setelah menghitung berbagai komponen, operasi militer, bantuan kemanusiaan, *veteran benefits* (kompensasi, asuransi, perawatan kesehatan, pensiun, santunan kematian), dan demobilisasi militer, diperkirakan ongkos perang mencapai angka yang jauh lebih mencengangkan yaitu US\$ 3 triliun.¹³

Selain itu, dipertimbangkan pula berapa tahun perang dan pendudukan Irak akan berlangsung, jangka pendek sampai 2011 (*military operation*) dan jangka panjang sampai 2017 (*service operation*). Biaya perang di luar kapasitas anggaran negara itu berdampak pada penurunan dan pelemahan perekonomian Amerika, yang memasuki krisis menjelang berakhirnya masa kepresidenan George Bush. Dengan membelanjakan uang sedemikian besar untuk perang, pemerintah Amerika telah kehilangan peluang untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial dasar bagi warga negaranya, sesuatu yang selama ini masih menjadi isu krusial dan belum tertangani secara tuntas. Masyarakat Amerika kerap kali menyuarakan kritik terbuka atas tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik yang dianggap kurang memuaskan. Pokok kritik

¹³*Ibid*, hal.25

publik Amerika adalah dana perang semestinya dimanfaatkan untuk membiayai tiga hal paling esensial, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Perang yang semula bermotif menguasai sumber daya minyak justru menjadi bumerang bagi Amerika sendiri. Perang membebani anggaran belanja pemerintah karena harga minyak melambung tinggi tak terkendali di luar ekspektasi Amerika. Sebelum perang, harga minyak hanya US\$ 25 per barel dan ketika perang berlangsung kemudian meroket pada kisaran US\$ 80-US\$ 90 per barel. Bahkan sekarang sudah mencapai US\$ 120 per barel. Kenaikan harga minyak lima kali lipat ini membawa implikasi peningkatan *public expenditure*, karena Amerika merupakan salah satu negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Dengan kenaikan harga minyak US\$ 10 per barel saja, pemerintah Amerika terpaksa mengeluarkan dana tambahan bagi *public expenditure* sebesar US\$ 400 juta untuk satu tahun anggaran belanja. Dengan perhitungan moderat, sampai 2015 dana tambahan yang diperlukan untuk mengatasi kenaikan harga minyak melampaui US\$ 1,6 triliun. Anggaran belanja yang meningkat menyebabkan defisit pada anggaran negara dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan sosial masyarakat AS.¹⁴

Perang Irak juga telah menewaskan lebih dari 4.000 tentara Amerika dan sekitar 67.000 menderita cacat/luka-parah. Tentara yang selamat pun banyak yang mengalami penderitaan fisik dan mental. Sampai akhir 2007, sebanyak 751.000 tentara selesai bertugas dalam *combat operation* (Irak, Afghanistan). Dari jumlah tersebut, sekitar 263,000 tentara membutuhkan perawatan kesehatan serius

¹⁴*Ibid*, hal.144

lantaran mengalami berbagai macam masalah, seperti lumpuh, retak/patah punggung, gangguan pendengaran (sampai tuli), rabun (sampai buta), penyakit kulit, yang disebabkan oleh efek ledakan dan radiasi bom serta dentuman meriam selama pertempuran. Tak kurang dari 52.000 tentara mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD) serta menderita *severe brain trauma* dan *massive brain damage*, yang berdampak serius pada gangguan kejiwaan, sehingga memerlukan perawatan kesehatan mental.¹⁵

Sementara itu Barack Obama telah menentang Perang Irak pada 2002, karena ia percaya bahwa meskipun Saddam Husein adalah rezim yang otoriter namun tidak mengancam keamanan AS. Sebaliknya ia menyatakan bahwa Amerika seharusnya menyelesaikan pertempuran dengan Al Qaeda dengan Osama Bin Laden yaitu orang yang bertanggung jawab atas tragedi 11 September. Ia memperingatkan saat itu bahwa invasi ke Irak hanya akan mengobarkan ekstremisme di Timur Tengah dan mengalihkan perhatian AS memerangi mereka yang bertanggung jawab atas serangan 11 September.

Dalam kampanye politiknya saat Pemilu Presiden, Obama berjanji akan menarik pasukan dalam waktu enam belas bulan. Barack Obama akan tetap meninggalkan sisa pasukan untuk melaksanakan misi terbatas, yaitu; membersihkan Al-Qaeda, perlindungan kekuatan, dan melatih pasukan keamanan Irak dengan tidak akan membangun kamp militer di Irak. Obama juga beranggapan bahwa Perang Irak hanya menghabiskan biaya perang yang sangat banyak, menjauhkan sekutu-sekutu Amerika dan melalaikan ancaman-ancaman

¹⁵ “Biaya Ekonomi, Sosial, Politik Perang Irak” oleh Amich Allumi dalam http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel_cetak.php?aid=26996 diakses 11 September 2009

kritis atas keamanan nasional AS yaitu dari Al-Qaeda maupun Taliban.¹⁶ Sebaliknya, Barack Obama menganggap bahwa musuh sebenarnya adalah Al-Qaeda yang berada di Afganistan ataupun Pakistan. Obama akan menarik pasukan Amerika Serikat dari Irak dan memfokuskan kekuatan militernya ke Afganistan ataupun Pakistan untuk memburu dan memerangi Osama Bin Laden dan Al-Qaeda.¹⁷

Pada saat AS masih dipimpin George W Bush, pemerintahannya telah membuat kebijakan bahwa pendudukan Irak akan berlangsung, jangka pendek sampai 2011 (*military operation*) dan jangka panjang sampai 2017 (*service operation*), walaupun pada akhir jabatan Bush Irak dan Amerika Serikat menyetujui kesepakatan keamanan bahwa pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan kota-kota besar di Irak pada Desember 2011¹⁸. Sementara itu Barack Obama dalam berbagai kesempatan ketika kampanye mengatakan bahwa akan menarik mundur sebagian besar pasukan AS dari Irak dalam 16 bulan sejak Januari 2009. Walaupun akhirnya setelah berhasil menjadi Presiden AS menggantikan Bush, Obama menetapkan 19 bulan setelah pelantikannya sebagai batas penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak atau Agustus 2010.

¹⁶ Barack Obama, *Change We Can Believe In*, Jakarta, Ufuk Press, 2009, hal. 294

¹⁷ *Ibid*, hal. 299

¹⁸ "Irak Tagih Janji Obama" dalam <http://www.jurnalbogor.com/?p=9541>, diakses 22 Januari 2010

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, muncul satu pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

”Mengapa Barack Obama melakukan upaya mempercepat penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak?”

E. Kerangka Dasar Teoritik

Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan suatu teori. Salah satu konsepsi yang dikemukakan oleh Mohtar Mas’oed menyatakan bahwa teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi atau statemen-statement tentang, misalnya perilaku rasional berdasar suatu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti ini dibuat untuk menggambarkan perilaku-perilaku politik aktor-aktor rasional¹⁹. Adapun untuk menganalisa kebijakan luar negeri, penulis menggunakan *Decision Making Theory*(Teori Pembuatan Keputusan). Teori Pembuatan Keputusan mengidentifikasi sejumlah variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut eksekutif, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat kebijakan yang sesungguhnya membentuknya kebijaksanaan pemerintah,

¹⁹Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: LP3ES,1990), hal.22

yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara²⁰.

Menurut Teori Pembuatan Keputusan, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah:

- (1) Kondisi Politik Dalam Negeri,
- (2) Kondisi Ekonomi dan Militer,
- (3) Konteks Internasional.

Yaitu, posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional itu²¹. Bahwa *"it assumed that decision makers act within a total perceived environment that includes their national political system as well as the international system as a whole an international environment as well as an external environment"*²².

Menurut William D Coplin:

"...Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar

²⁰ James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito (Yogyakarta: Fisipol UMY, 1995); hal.373

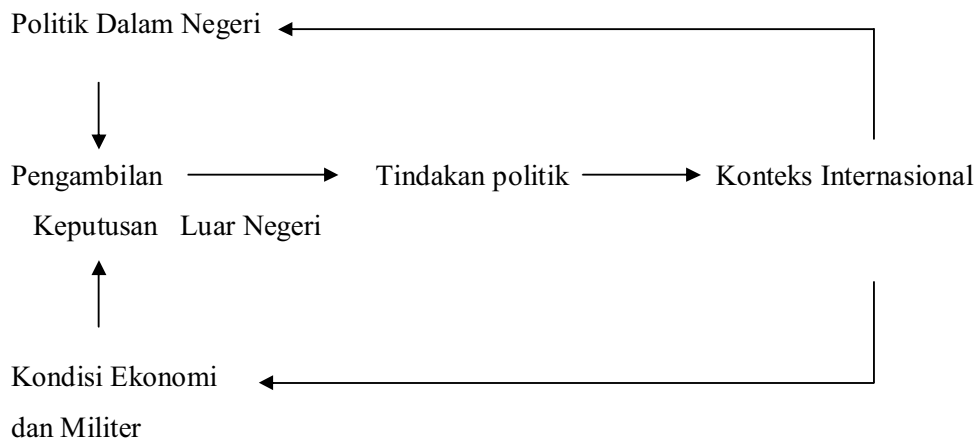
²¹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional; Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung; Sinar Baru, 1992), hal.30

²² James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. , *op.cit*, hal 470

negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi...²³.

Untuk lebih jelasnya ilustrasi bagan dibawah ini menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.

Skema Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah Teoritis
(Bandung: Sinar Baru, hal 1992) hal.30

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa ketiga faktor tersebut diatas akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Untuk itu penulis akan menerapkan ketiga faktor tersebut dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Barack Obama dalam upayanya melakukan percepatan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak, yaitu:

²³ William D. Coplin, *loc. cit.*

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam sebuah sistem politik banyaknya tuntutan dan dukungan yang bisa kita kategorikan sebagai *input*, sangat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan. Input-input yang berupa dukungan dan tuntutan inilah yang nantinya akan membentuk kondisi politik suatu negara. Kondisi politik dalam negeri inilah yang akan sangat berpengaruh dan mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Bagaimanakah kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar, apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat (*Output*). Kebijakan pemerintah AS dipengaruhi situasi politik dalam negeri (*Domestic Politic*) yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Adanya dukungan dari sebagian besar masyarakat AS terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Barack Obama dalam mempercepat penarikan pasukan militer AS dari Irak.

Situasi politik dalam negeri suatu negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Dalam sistem politik Amerika Serikat yang menganut demokrasi terdapat suatu pandangan politik bahwa lembaga politik atau pemerintah menterjemahkan keinginan rakyatnya ke dalam kebijakan politik. Hal itu berarti di Amerika peran rakyat lewat saluran opini publik yang berupa *polling* sebagai acuan yang berasal dari interpretasi personal dari suatu masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan, menjadikannya sebagai alat kontrol sosial sebagai realitas yang bermakna. Dengan begitu opini publik di AS sudah menjadi

mitos utama bangsa yang sudah merupakan kepercayaan umum. Opini publik akan muncul apabila terjadi suatu peristiwa dimana kemunculannya akan disertai dengan tindakan-tindakan yang cepat/hebat, sehingga dapat dikatakan opini publik akan muncul ketika ada suatu peristiwa atau isu yang dlontarkan yang kemudian mulai dicari penyelesaiannya atau penentuan tindakan selanjutnya meskipun jalannya akan sangat lambat.

Polling atau jajak pendapat dalam pemerintahan AS telah mulai terasa dibutuhkan pada masa kampanye pemilu calon presiden JF Kennedy, sejak saat itu jajak pendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari kantor kepresidenan. Kebutuhan terhadap jajak pendapat atau *polling* semakin meningkat terutama menjelang pemilihan umum. *Polling* pada saat kampanye bermanfaat untuk mengenali persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Lewat *polling* inilah calon presiden dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pemerintah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan seorang calon dalam menyusun program kampanyenya berdasar *polling* tersebut.²⁴

Hubungan antara opini publik dari jajak pendapat dan pembuatan kebijakan publik terjadi terutama karena pada dasarnya setiap pejabat publik ingin populer di mata masyarakat dan pejabat politik ingin dipilih dalam pemilihan umum atau ingin kebijakannya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik yang diupayakan mendekati sentimen atau aspirasi publik. Dimana dalam kasus perang Irak, Barrack Obama akan menarik pasukannya dari

²⁴ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal 77.

Irak 19 bulan setelah ia dilantik sebagai Presiden, berbeda 3 bulan dimana Obama berjanji akan menarik pasukan militer AS dalam waktu 16 bulan.

Opini publik yang diwujudkan dalam jajak pendapat publik atau *polling* publik tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik timbul bersamaan dengan kemunculan demokrasi. Hal ini bukan merupakan hubungan yang kebetulan sifatnya, melainkan hubungan yang mencerminkan sifat demokrasi dan jajak pendapat publik itu sendiri. Secara teknis menggali opini publik secara sistematis, seperti melalui survei tentang masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik dan publikasi terhadap hasilnya merupakan suatu hal yang sangatlah biasa di negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti AS.

Keinginan masyarakat Amerika Serikat yang menginginkan agar pasukan militer Amerika Serikat segera ditarik mundur yang tercermin dari beberapa *polling*. Seperti *polling* yang dilakukan oleh FOX News/Opinion Dynamics Poll pada 15-16 Mei 2007 yang menanyakan apa yang lebih penting bagi militer Amerika Serikat di Irak apakah memulihkan stabilitas Irak atau segera keluar dari Irak, responden yang berjumlah 900, 46 persen responden memilih agar segera keluar dari Irak, 34 persen agar militer AS menstabilkan situasi di Irak, 16 persen netral, dan 3 persen suara tidak sah.²⁵ Ketika Barrack Obama pada 27 Februari 2009 mengumumkan akan menarik pasukan AS dari Irak pada 31 Agustus 2010 atau 18 bulan, sebanyak 78 persen responden setuju dengan keputusan itu dan hanya 18 persen saja yang tidak setuju dimana *polling* dilakukan oleh Pew

²⁵<http://www.pollingreport.com/iraq.htm>, diakses 11 November 2011

Research Center Poll pada 9-12 Maret 2009 kepada 1.308 responden masyarakat AS.

Dalam sistem politik demokrasi terdapat apa yang disebut dengan legitimasi, dimana legitimasi menjadi suatu tujuan pemerintah terhadap rakyatnya untuk memberikan pembenaran terhadap tindakan atau kebijakan yang diambilnya. Rezim merasa perlu tahu apa yang menjadi preferensi warga negara, dimana preferensi atau tanggapan warga negara tersebut akan sangat diperlukan untuk melegitimasi tindakan atau kebijakan selanjutnya. Tanpa mengetahui preferensi masyarakat dengan baik pemerintah tidak dapat merespon kehendak rakyat secara tepat dan mekanisme hubungan pemerintah dan rakyat tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan demokrasi.²⁶ Jika dikaitkan dengan sistem demokrasi di Amerika Serikat, tanggapan masyarakat tersebut ada dalam bentuk opini publik berupa *polling*.

Di Amerika Serikat pendapat umum dalam bentuk hasil *polling* atas popularitas presiden merupakan salah satu senjata andalan yang dapat dimanfaatkan Presiden untuk menekan Kongres, birokrasi maupun kelompok kepentingan. Dengan demikian Kongres memang secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik dan keamanan nasional.²⁷ Karena setiap anggota Kongres rajin mengikuti perkembangan masyarakat (*public hearing*) terhadap Presiden yang disajikan dalam bentuk hasil *polling*. Berdasarkan hasil *polling* inilah Kongres menentukan langkah apakah akan mendukung atau menolak setiap

²⁶ Andrew Heywood, *Politics*, Macmillan Press LTD, London, 1997, hal.194-195

²⁷ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal 212.

kemauan presiden. Presiden, sebaliknya akan mengeksploitasi hasil *polling* sesuai dengan kemauannya. Bila hasil *polling* bagus maka Presiden akan memanfaatkannya secara kreatif untuk menekan Kongres dan mencapai tujuan-tujuannya.²⁸

Dalam kebijakan mempercepat penarikan pasukan militer dari Irak pada 27 Februari 2009, legitimasi sebuah kebijakan dari masyarakat terhadap pemerintahan Barrack Obama yang baru dilantik pada 20 Januari 2009 sangat penting bagi pemerintahan baru Obama mengingat di Amerika Serikat pada awal pemerintahan seorang presiden terpilih bisa dikatakan merupakan orang yang paling terkenal di seluruh Amerika dibandingkan dengan tokoh ataupun selebriti lainnya. Popularitas inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal untuk memulai pemerintah baru. Popularitas presiden menghasilkan berbagai harapan dari kalangan pendukungnya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Besarnya harapan publik ini membuat setiap presiden baru dipastikan akan memulai pemerintahannya dengan masa bulan madu (*honeymoon*). Bila masa bulan madu yang hanya beberapa bulan ini berakhir seorang presiden harus siap menghadapi publik Amerika yang sangat kritis.²⁹ Untuk mengantisipasi kecemasan-kecemasan publik, Presiden Amerika dituntut untuk piawai dalam mengelola perekonomian bangsa dan juga krisis internasional yang dijadikan ukuran popularitas presiden yang merupakan salah satu sumber kekuasaan presiden.³⁰

²⁸*Ibid*, hal 158

²⁹ Dr. Bambang Cipto, *op.cit*, hal. 154

³⁰*Ibid*

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan. Para penstudi pembangunan ekonomi biasanya membuat pemisahan yang tegas antara negara-negara yang secara ekonomi sudah maju, ekonominya mandek dan prospek pertumbuhannya sangat kecil, kemudian masyarakat yang ekonominya mandek tapi tidak lama lagi akan mampu membelok ke arah pembangunan ekonomi, berikutnya negara yang ekonominya sedang berkembang dimana terdapat peluang untuk pertumbuhan tetapi masih lama, kemudian terakhir negara yang secara ekonomi sudah jelas berkembang dan pertumbuhannya sangat mungkin berkelanjutan.³¹ Dan dalam hal ini Amerika Serikat negara yang

³¹ Russet et al., *World Handbook*, hal 293-303, dalam William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Baru, 1992). hal. 120

secara ekonomi sudah maju tetapi sedang mengalami kemandekan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kondisi ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Antara ekonomi dan militer tidak bisa saling beriringan dan salah satu harus dikorbankan.

Ditinjau dari kapabilitas ekonominya, sebelum terjadinya resesi ekonomi, Amerika Serikat mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yang didukung oleh industri maju di segala bidang, juga perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di luar negeri, sehingga dolar Amerika Serikat menguasai transaksi ekonomi dunia. Jika ekonomi AS terguncang, maka akan berdampak pada sektor lain, seperti sosial, politik, militer dan keamanan. Dalam kasus Amerika Serikat pada saat Obama terpilih menjadi presiden, ekonomi AS sedang mengalami guncang yaitu dalam keadaan mengalami resesi ekonomi, dan besarnya biaya perang Irak mempengaruhi kebijakan Obama untuk menarik pasukan militernya dari Irak.

3. Konteks Internasional

Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga di fokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara itu akan membuat sebuah kebijakan. Situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan pertimbangan bagi *decision maker* dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu bangsa.

Konteks Internasional yaitu situasi di suatu negara dimana politik luarnegeri ditujukan serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kondisi internasional mempengaruhi aktivitas dan kebijakan politik luarnegeri. Pengaruh yang ditimbulkan berasal dari tiga elemen, yaitu geografis, ekonomi dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi-lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antar negara itu dengan negara-negara lainnya.

Dari ketiga elemen itu, elemen geografi merupakan elemen yang memainkan peran politik luar negeri yang penting, meskipun bukan peran terpenting seperti yang diberikan oleh para ahli geopolitik pada masa lalu. Russett mendemonstrasikan betapa proksimitas atau kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, perilaku pemberian suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antarpemerintah, meskipun di beberapa kawasan hubungan itu lebih erat dari pada kawasan lain.

Dalam konteks internasional, ekonomi menjadi elemen yang sangat penting. Hubungan kerjasama, bantuan maupun boikot ekonomi dapat sangat mempengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara. Hubungan politik dengan negara-negara lain sangat mempengaruhi dalam lingkungan sangat berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik luarnegeri suatu negara. Erat dan longgarnya hubungan suatu negara dengan negara lain dapat

mempengaruhi suatu negara dalam mengambil suatu keputusan khususnya untuk memperoleh dukungan dari negara lain mengenai tindakan luar negeri.

Kebijakan presiden Bush dengan menginvasi Irak telah menjatuhkan citra dan melemahkan posisi Amerika di mata masyarakat internasional, merenggangkan hubungan mereka dengan Eropa dan dimusuhi umat Islam di dunia. Amerika perlahan kehilangan kredibilitas dan pengaruh sehingga *international political leverage* negara adidaya itu kian melemah. Hal yang lebih menohok, kebencian terhadap Amerika hampir merata di berbagai belahan bumi. Amerika pun dicap sebagai agresor dan penjelmaan kolonialisme baru pada zaman modern karena menginvasi dan kemudian menduduki sebuah negara berdaulat.

Citra buruk AS di dunia internasional tampak pada beberapa *polling* yang telah dilakukan. Pada akhir 2007, *BBC* dan *GlobeScan* melakukan jajak pendapat internasional yang melibatkan 26,381 responden di 25 negara. Hasil *polling* menunjukkan, 1 dari 2 (49,9 persen) warga negara menyatakan Amerika memainkan peranan negatif di pentas dunia. Bahkan, publik Amerika sendiri menilai pengaruh Amerika di panggung internasional menurun tajam dari 71 persen sebelum perang menjadi 47 persen setelah perang.³²

Bahkan beberapa negara yang secara tradisional punya hubungan erat dengan AS, survey memperlihatkan posisi AS menurun tajam. Menurut Pew poll, sikap positif warga Inggris terhadap AS menurun dari 83 persen pada tahun 2000

³²“Biaya Ekonomi, Sosial, Politik Perang Irak” oleh Amich Allumi dalam http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel_cetak.php?aid=26996 diakses 11 September 2009

menjadi 56 persen. Di Jerman, angka menyusut dari 78 menjadi 37 persen. Menurut sebuah survey lain di Jerman, Marshal Fund, hanya 36 persen menganggap kepemimpinan AS sebagai hal positif. Pada tahun 2002, angka itu mencapai 64 persen. Ditanya alasan apa yang mendasari penurunan itu, 34 persen menjawab karena Presiden Bush, dan 38 karena perang Irak. Hal yang sama juga berlaku di Cina, sebanyak 57 persen menganggap AS sebagai negara yang kurang baik. Alasannya adalah arogan, perang Irak dan unilateralisme.³³

Pemerintah Barack Obama menganggap bahwa Perang Irak membawa citra negatif. Bahkan meregangkan hubungan Amerika dengan sekutu mereka Eropa dan menyuburkan kebencian umat muslim terhadap AS. Eropa menjadi penting bagi AS karena sebagian besar sekutu mereka berada di kawasan tersebut dan menjalin kerjasama dalam beberapa jalinan kerja sama antar negara seperti NATO dalam bidang kerjasama bidang militer maupun G-20 dalam bidang ekonomi dan AS mempunyai kepentingan disana. Sedangkan dengan dunia muslim Obama ingin merubah paradigma bahwa AS adalah musuh Islam dan menghilangkan kebencian Islam terhadap AS akibat tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap negara Islam, seperti menginvasi Irak paska peristiwa 11 September 2001.

³³ “Masihkan Amerika Superpower?” dalam <http://rizqonkham.blogspot.com/2008/02/as-di-mata-santri-masihkan-amerika.html>, diakses 11 Februari 2010

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka kebijakan Presiden Barack Obama dalam upayanya mempercepat penarikan pasukan militer AS dari Irak disebabkan oleh faktor-faktor:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri, yaitu untuk memperoleh popularitas dan legitimasi dari publik AS sebagai modal dalam mengambil kebijakan-kebijakan berikutnya oleh pemerintahan Obama mengingat pemerintahan Obama masih relatif baru.
2. Kondisi ekonomi dan militer, yaitu resesi ekonomi AS yang berdampak pada militer AS, dalam hal ini penarikan pasukan militer AS dari Irak akibat besarnya biaya ekonomi yang harus dikeluarkan AS.
3. Konteks internasional, yaitu untuk memperbaiki citra AS di dunia internasional dengan memperbaiki hubungan dengan Eropa yang memburuk akibat invasi AS ke Irak, serta hubungan dengan dunia Islam yang juga memburuk paska tragedi 11 September 2001 dan invasi AS ke Irak.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih konkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah tahun 2001-2010. yaitu awal pendudukan pasukan militer Amerika Serikat di Irak yaitu ketika terjadinya invasi militer Amerika Serikat ke Irak yang berawal dari peristiwa 11 September 2001. Dan tahun 2010 yaitu ketika Presiden Barack Obama melakukan percepatan penarikan pasukan

Amerika Serikat dari Irak. Namun begitu tidak menutup kemungkinan terhadap peristiwa-peristiwa yang masih relevan walaupun terjadi diluar tahun jangkauan penelitian tersebut.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik *library reseach* atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap, terinci, dan semudah mungkin dipahami.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan dipilih data yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta memiliki relevansi terhadap data yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Disamping pemaparan yang penulis susun di atas, sebagai unsur dari penulisan yang paling penting dalam karya ilmiah, maka perlu adanya sistematika dalam penulisan. Dengan demikian penulisan skripsi ini tidak akan menyalahi kaidah penulisan ilmiah yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari Lima Bab (5 BAB).

BAB I. Pada Bab ini terdiri dari pendahuluan. Pada bagian ini akan dijabarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teoritik, hipotesa, metodologi, serta sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini penulis akan membahas tentang kebijakan AS menginvasi Irak yang berawal dari peristiwa 11 September 2001. Akan dibahas juga pendudukan militer AS di Irak dan situasi politik di Irak paska invasi serta kebijakan-kebijakan George W. Bush selama pendudukan tersebut termasuk kesepakatan keamanan antara AS dengan Irak.

Bab III. Pada bab ini penulis akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi AS menjelang sampai berakhirnya Pemilihan Presiden tahun 2008 yang meliputi situasi politik dalam negeri AS, yaitu opini publik yang menentang perang Irak dan menginginkan penarikan pasukan militer AS dari Irak hingga isu perang Irak yang mempengaruhi kemenangan Barack Obama dalam Pemilu Presiden tahun 2008. Keadaan ekonomi AS paska invasi ke Irak yang mengalami

keterpurukan dan merugikan militer AS dengan banyaknya korban nyawa akibat perang Irak. Dan terakhir dalam konteks internasional dimana perang Irak telah membentuk citra buruk di dunia internasional khususnya di Eropa dan dunia Islam yang berakibat pada hubungan buruk antara AS-Eropa dan AS-Islam paska invasi AS ke Irak

Bab IV. Bab ini membahas tentang motivasi Barack Obama dalam upaya percepatan penarikan pasukan AS dari Irak yang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri AS yaitu untuk mendapatkan popularitas sebagai alat legitimasi sumber kekuasaannya pemerintahannya yang masih baru. Kondisi ekonomi dan militer, yaitu resesi ekonomi AS yang berdampak pada militer AS. Dalam hal ini pengaruh besarnya biaya ekonomi perang Irak terhadap penarikan pasukan militer AS dari Irak. Dan dalam konteks internasional yaitu untuk memperbaiki citranya di dunia internasional dengan cara memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara sekutunya terutama di Eropa paska invasi ke Irak dan memperbaiki hubungannya dengan dunia Islam paska peristiwa 11 September 2001 dan invasi AS ke Irak.

Bab V. Bab ini berisi kesimpulan dan merupakan pembahasan terakhir atau penutup dari penulisan skripsi.